WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran kebijakan dan strategi daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Kota Kotamobagu sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional ;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan ;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Kotamobagu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Badan, Dinas, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Daerah lain dilingkup Pemerintah Kota Kotamobagu.
6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah tujuh belas agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia.

7. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah upaya Pemerintah Kota Kotamobagu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari empat aspek sesuai indikator SDGs yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek tata kelola.
8. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals yang selanjutnya disebut RAD SDGs adalah rencana kerja Kota Kotamobagu dalam mempercepat pencapaian target SDGs dari Tahun 2016 hingga Tahun 2030.

BAB 2

RAD SDGs

Pasal 2

RAD SDGs merupakan dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan di Pemerintah Kota Kotamobagu dalam upaya percepatan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2016-2030.

Pasal 3

Dokumen RAD SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)
BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB IV PENUTUP

BAB 3

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

RAD SDGs menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam

upaya percepatan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD SDGs.

(2) Tata cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB 4

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelola	Paraf
1.	Plt. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala Bappelitbangda	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 10 November 2017

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 10 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

ADNAN, S.Sos., M.Si.

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 33

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
BAPPELITBANGDA

RENCANA AKSI DAERAH
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
SDGs
TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan sehingga akhirnya kami menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kota Kotamobagu. Dokumen RAD ini dibuat oleh pemerintah daerah, mengingat peran penting Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dalam proses pembangunan berkelanjutan selama ini.

RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs kiranya akan mendorong upaya–upaya yang lebih baik dari Pemerintah Pusat, untuk dapat melaksanakan Agenda SDGs dapat dimanfaatkan untuk membantu memperkuat upaya–upaya menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang selama ini telah dilakukan.

Akan tetapi Dokumen perencanaan Rencana Aksi Daerah ini, masih perlu untuk ditindaklanjuti dengan memperhatikan meta-data SDGs yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan demikian, sangat diharapkan agar setiap Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam POKJA-POKJA dapat saling bersinergi, koordinasi dalam rangka penyempurnaan RAD TPB/SDGs Kotamobagu ini.

Kotamobagu, Oktober 2017

Bappelitbangda Kotamobagu

DAFTAR ISI

Kata Pengatar
Daftar Isi
Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 1
1.2. Permasalahan dan Tantangan 25

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) . 26

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 46

BAB IV
PENUTUP

Lampiran:

1. Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
2. Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Kotamobagu
3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Kotamobagu

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

a. Gambaran Umum Kota Kotamobagu

Secara geografis Kota Kotamobagu berada pada posisi $124^0$15' 9,56" – 124^0 21' 1,93" Bujur Timur dan 0^0 41' 16,29" - 0^0 46' 14,8" Lintang Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Passi Timur dan Kecamatan Barat
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Modayag
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Lolayan
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Passi Barat

Terletak pada jarak ± 180 km di selatan Ibu Kota Provinsi (Kota Manado). Kota Kotamobagu secara Administratif terbagi dalam 4 Kecamatan dan 33 Desa/Kelurahan yang memiliki luas wilayah keseluruhan ± 68,06 km^2 (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara).

Kota Kotamobagu dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten hasil pemekaran yaitu; Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (induk), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Awalnya Kota Kotamobagu sebelum dimekarkan sudah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Induk. Dalam konteks regional, Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produk jasa khususnya diwilayah Bolaang Mongondow Raya dan umumnya pada kawasan propinsi Sulawesi Utara.

Dengan demikian Kota Kotamobagu harus menyiapkan dirinya menjadi kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang siap melayani kebutuhan

kebutuhan, event-event nasional/Internasional yang akan dan bisa diselenggarakan di Kota Kotamobagu.

Pelayanan yang ekstra bagi pemenuhan kebutuhan warga juga menjadi tuntutan utama karena semakin berkembang dan beragamnya kebutuhan seluruh warga terhadap barang dan jasa. Implikasi dari semua ini adalah meningkatnya kebutuhan pengadaan sarana transportasi masyarakat Kota, timbulnya kemacetan, meningkatnya jumlah pedagang kaki lima, rusaknya tata kota, semakin menurunnya kualitas kebersihan kota sebagai akibat dari kelebihan penduduk dan segala aktivitasnya yang melebihi daya dukung lingkungan.

Kota Kotamobagu berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), serta berdekatan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Jarak antara Kotamobagu dengan Manado 183,72 Km (melalui Inobonto) dan 207,26 Km (melalui Modoinding). Kota Kotamobagu merupakan pusat kegiatan ekonomi terkemuka di bagian barat dan selatan Sulawesi Utara.

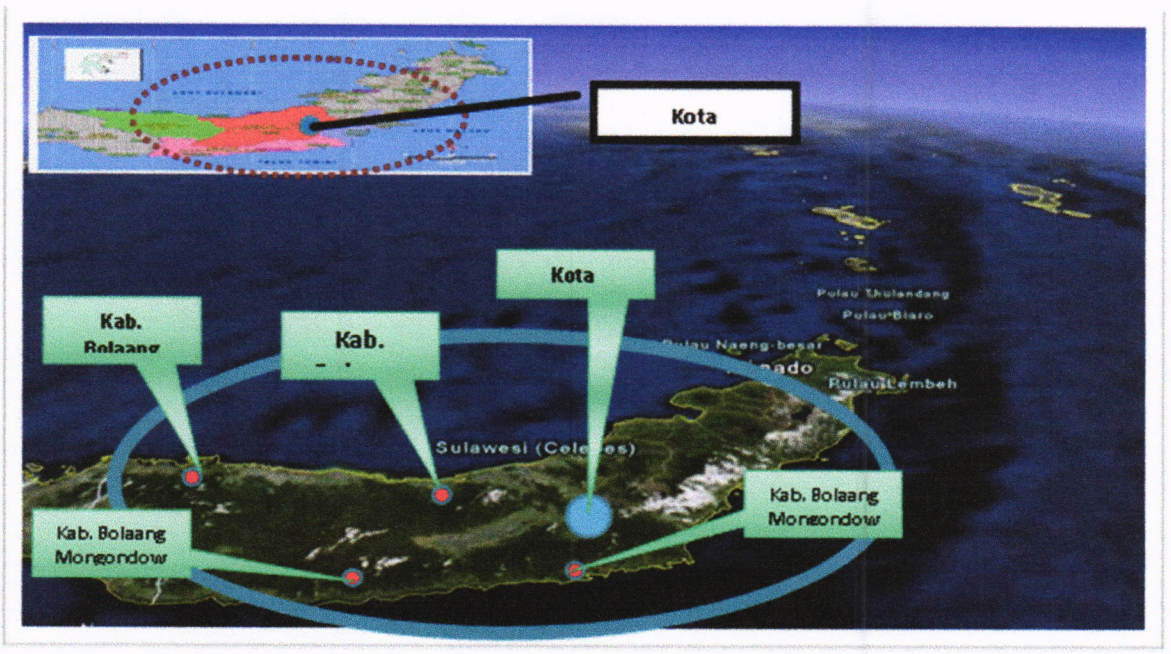

Topografi

Kota Kotamobaru secara topografis berada dalam bentuk topografi bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Bukit Tudu in bakid yang terletak di desa Pontodon serta bukit disekitar Gogagoman yang menjadi lokasi kuburan bogani, merupakan dua bukit yang sangat di kenal memiliki nilai sejarah yang berhubungan dengan kultur Bolaang Mongondow.

Kota Kotamobagu memiliki ketinggian yang bervariasi, Desa yang tertinggi adalah Desa Moyag Todulan dengan ketinggian 650 M diatas permukaan laut (dpl), diikuti Desa Moyag Tampoan dengan Ketinggian 635 M diatas permukaan laut (dpl).

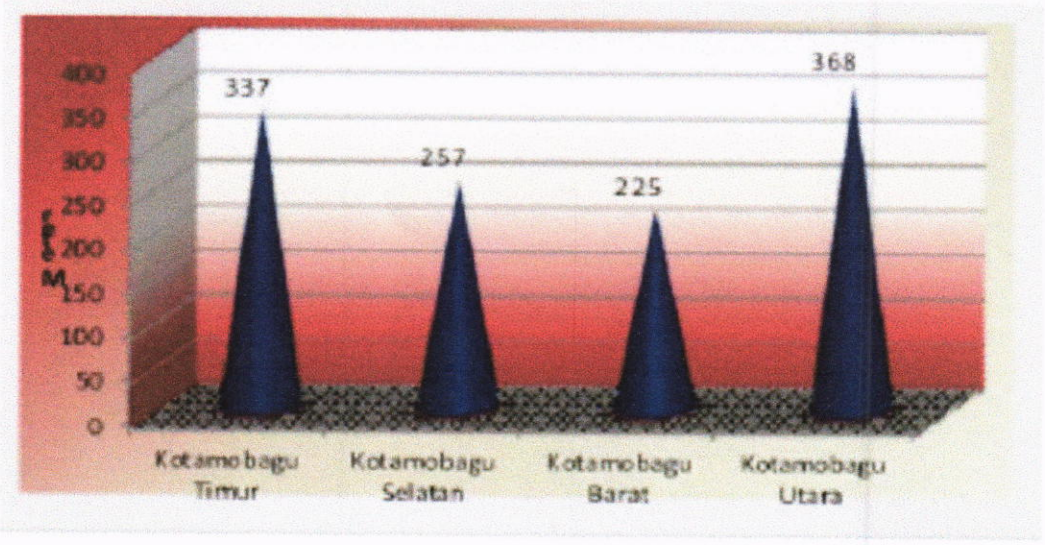

Geologi

Sulawesi terletak pada pertemuan Lempeng besar Eurasia, Lempeng Pasifik, serta sejumlah lempeng lebih kecil (Lempeng Filipina) yang menyebabkan kondisi tektoniknya sangat kompleks. Kumpulan batuan dari busur kepulauan, batuan bancuh, ofiolit, dan bongkah dari mikrokontinen terbawa bersama proses penunjaman, tubrukan, serta proses tektonik lainnya (Van Leeuwen, 1994). Berdasarkan keadaan litotektonik, Sulawesi dibagi tiga mandala, yaitu: Mandala barat sebagai jalur magmatik yang merupakan bagian ujung timur

Paparan Sunda; Mandala tengah berupa batuan malihan yang ditumpangi batuan bancuh sebagai bagian dari blok Australia; dan Mandala timur berupa ofiolit yang merupakan segmen dari kerak samudera berimbrikasi dan batuan sedimen berumur Trias-Miosen (Gambar 1.2.).

Van Leeuwen (1994) menyebutkan bahwa mandala barat sebagai busur magmatik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bagian utara dan barat. Bagian utara memanjang dari Buol sampai sekitar Manado, dan bagian barat dari Buol sampai sekitar Makassar. Batuan bagian utara bersifat riodasitik sampai andesitik, terbentuk pada Miosen-Resen dengan batuan dasar basaltik yang terbentuk pada Eosen-Oligosen. Busur magmatik bagian barat mempunyai batuan penyusun lebih bersifat kontinen yang terdiri atas batuan gunung api hingga sedimen berumur Mesozoikum-Kuarter dan batuan malihan berumur Kapur. Batuan tersebut diterobos granitoid bersusunan terutama granodioritik sampai granitik yang berupa batolit, stok, dan retas.

Dilihat dari kondisi geologisnya maka formasi batuan yang terdapat di Kota Kotamobagu dan sekitarnya terdiri atas batuan vulkanik dengan komposisi terdiri dari breksi, tuff dan lava bersusunan andesit, dasit dan rhyolit. Tuff umumnya bersifat dasitan, agak kompak dan berlapis buruk pada beberapa tempat. Tebal satuan formasi ini diperkirakan lebih dari 1.000 m sedangkan umurnya berdasarkan kandungan fosil dalam sisipan batu gamping adalah Miosen bawah-Miosen akhir. Di bagian atas dari batuan volkanik Bilungala terdapat Batuan Volkanik Pinogu (TQpv) yang lebih muda umurnya, yang terdiri dari tuff, tuff lapili, breksi dan lava. Satuan ini umumnya termampatkan lemah sampai sedang. Umur formasi batuan ini diperkirakan Pliosen-Plistosen (John dan Bird, 1973).

Secara geologis pula, di Kota Kotamobagu terdapat tiga (3) busur utama yang telah dapat dipetakan, yaitu sebagai berikut: i) Early Eocene–MiddleEocene; dikarakterisktikan oleh lapisan tebal yang didominasi oleh vulkanik basalt dengan komposisi tholeiitic dan berasosiasi dengan sedimen laut dalam (Trail et

al.,1972; van Leeuwen and Muharjo, 2005); ii) Miocene; diwakili oleh calk alkaline vulkanic yang diterobos oleh batuan intrusi comagmaticgranitoid. Batuan intrusive tersebut menjari dengan batuan sedimen laut dangkal. iii) Pliocene – recent, terdiri dari sub aerial vulkanik dengan komposisi andesit dan dasit and high level intrusive (Carlile at al.,1996; Kavalieris et al., 1992; Person and Caira, 1999). Peristiwa geologi yang terjadi meliputi dua (2) peristiwa magmatic: i) miocene dikarakteristikan dengan intrusive diorite di dalam lava andesit dan batuan sedimen ii) Plio Pleistocene volcanic yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dasitik piroklastik dan berasosiasi dengan alterasi asam sulfat.

Gambar 1.3.

Peta Satuan Litotektonik Sulawesi (Van Leeuwen, 1994)

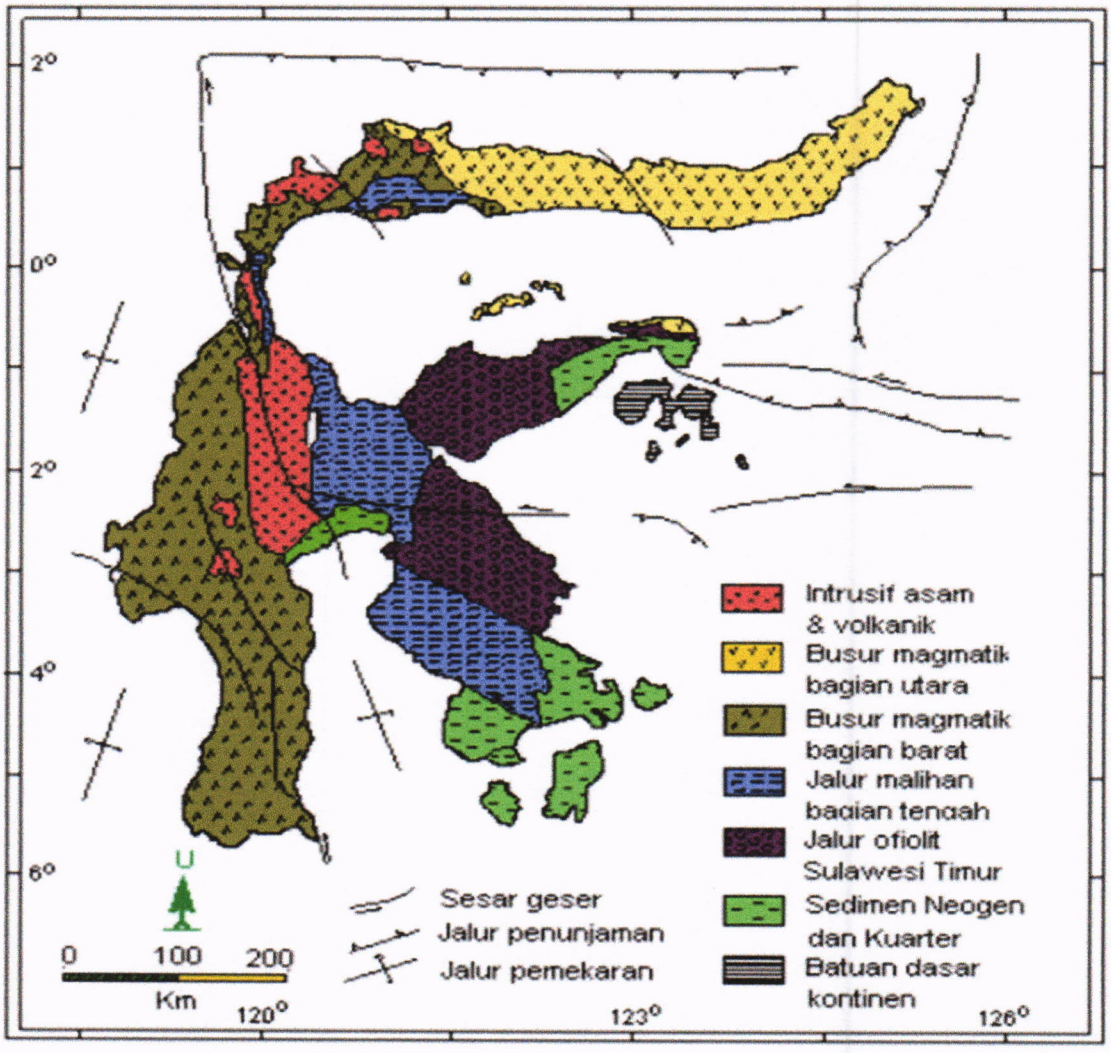

Berdasarkan formasinya, maka wilayah pusat Kota Kotamobagu sebagian besar merupakan formasi Qpl atau dikenal sebagai formasi Endapan Danau yang memiliki ciri: tersusun atas batulempung, batupasir dan kerikil. endapan ini pada umumnya didominasi oleh batulempung yang berwarna abu-abu kecoklatan; setempat mengandung sisa tumbuhan dan lignit. Di beberapa tempat terdapat batupasir berbutir halus hingga kasar, serta kerikil. Pada batupasirnya setempat terdapat struktur silang siur berskala kecil. Umumnya satuan ini masih belum padu. Umurnya diperkirakan plistosen sampai holosen. Sebaran batuan ini terutama menempati daerah lembah Paguyaman dan di

sekitar danau Limboto. Ketebalannya mencapai 94 m, dialasi oleh batuan diorit (Trail, 1974).

Berdasarkan kondisi geologi-nya, daerah pengamatan dipisahkan menjadi 3 (tiga) sistem akuifer, yaitu sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui ruang antar butir, sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui celahan dan ruang antar butir, serta sistem akuifer bercelah atau sarang. Berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, potensi air tanah di Cekungan Kotamobagu dibagi menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu :

1. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanahnya melalui ruang antar butir, yang terdiri dari pasir, lumpur, dan kerikil. Kedudukan muka air tanah dangkal berkisar antara 0,20 - 1,30 m bmt setempat;

2. Wilayah Potensi Air Tanah Sedang, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanahnya melalui ruang antar butir, celahan, rekahan, dan saluran yang terdapat pada lapisan pasir, lumpur, kerikil, batu pasir, tufa, aglomerat, lahar, lava, dan batu gamping;

3. Wilayah Potensi Air Tanah Rendah, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui celahan, rekahan, dan ruang antar butir yang terdapat pada batuan hasil gunungapi berupa batu pasir, tufa, aglomerat, lahar, lava, dan breksi. Terdapat pula pada batu pasir, greuwake, serpih, dan rijang. Banyak dijumpai pula mata air dengan debit 0,1-4 l/dtk, kedudukan muka air tanah dangkal lebih dari 5 m bmt setempat;

4. Wilayah Potensi Air Tanah Langka atau Tidak Berarti, menempati daerah punggungan dan puncak bukit/gunung. Setempat-setempat dijumpai mata air dengan debit kecil, kurang dari 1 l/dtk dan rembesan-rembesan. Kedudukan muka air tanahnya bervariasi dengan kedalaman 9 m bmt setempat.

Berdasarkan kenampakan geologi, sistem akuifer, kuantitas, dan kualitas air tanahnya serta kemudahan dalam cara pengambilan air tanah, di Cekungan

Kotamobagu dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) zona prospek pengembangan air tanah, yaitu: Zona pengembangan air tanah yang diprioritaskan dari sumur gali, mata air yang berdebit besar, dan sumur bor.

Hidrologi

Terdapat sejumlah aliran sungai yang melintasi Kota Kotamobagu diantaranya yang terbesar adalah Ongkag Mongondow yang bermuara di Inobonto yang bergabung dengan Ongkag Dumoga. Sungai-sungai lain adalah Sungai Kotobangon,sungai Gogagoman,sungai Moayat (Irigasi Moayat di Desa Poyowa Besar) dan beberapa sungai kecil lainnya. Oleh karena itu memiliki sumber daya air yang melimpah,untuk kebutuhan air baku,kolam dan berbagai usaha lainnya. Pada umumnya aliran sungai tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kota Kotamobagu sebagai sarana MCK dan usaha perikanan serta sumber air baku bagi PDAM. Keberadaan air tanah di Kota Kotamobagu kualitasnya terbilang cukup baik. Namun demikian tingkat pelapukan batuan yang ada di wilayah Kota Kotamobagu terjadi cukup tinggi yang diikuti dengan laju perubahan penutupan lahan oleh pembangunan menyebabkan kapasitas infiltrasi air hujan menjadi sangat rendah yang berakibat pada tingginya run off, hal ini merupakan salah satu penyebab menurunnya muka air tanah di musim kemarau. Berikut daftar nama sungai dirinci menurut kecamatan yang ada di wilayah Kota Kotamobagu.

Iklim di Kota Kotamobagu memilik curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada Desember-Januari, dan terendah pada bulan Agustus-September. Suhu udara berada di kisaran 18° C – 28°C. Sebagian besar wilayah digunakan untuk kegiatan pertanian, diikuti pemukiman, perkantoran, dan perdagangan. Suhu udara rata-rata adalah 25,2°C. Suhu udara maksimal rata-rata tercatat 30,4°C dan suhu udara minimum rata-rata 22,°C. Kelembaban udara tercatat 73,4%. Kendati demikian

suhu atau temperatur Kota Kotamobagu juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut.

Tabel 1.1.
Sungai yang Melintas Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu

Kecamatan	Nama Sungai	Panjang Sungai (M)
Kotamobagu Utara	Bilalang	13.200
	Toko/Dayanan	10.300
	Kotobangon	10.500
Kotamobagu Selatan	Yantaton	13.000
	Kopek	15.000
Kotamobagu Timur	Bonodon	13.000
	Yoyak	13.000
	Motoboy Besar	13.500
Kotamobagu Barat	Mongkonai	20.000

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu.

Iklim merupakan salah satu faktor determinan yang sangat menentukan tingkat kesesuaian lahan, produktivitas, jenis, dan mutu produk. Setiap jenis tanaman memerlukan unsur iklim dengan kisaran tertentu dalam setiap fase pertumbuhannya. Pada keadaan tertentu fluktuasi unsur iklim yang ekstrim menjadi faktor pembatas terutama pada fase kritis yang pengaruhnya sangat besar terhadap penurunan hasil tanaman. Namun di sisi lain keragaman dan dinamika iklim dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem dan usaha agribisnis, terutama dalam kaitannya dengan jenis dan mutu hasil serta periode panen. Kota Kotamobagu memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara maka secara umum Kota Kotamobagu juga beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November samapai bulan April bertiup angin barat yang menurunkan hujan. Sebaliknya angin tenggara yang bertiup dari bulan Mei sampai Oktober mendatangkan mendatangkan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (165,0 mm) dan terendah jatuh pada bulan Mei. Rata-rata curah hujan yang terjadi antara 2.000-2.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 90 - 120 hari.

Penggunaan Lahan

Tutupan lahan saat ini (*present landuse*) merupakan cerminan tingkat penggunaan lahan dan penerapan teknologi masyarakat setempat saat ini. Berdasarkan analisis cita World view komposit warna sesungguhnya liputan bulan Oktober 2010, daerah penelitian dapat dikelompokan menjadi 7 (tujuh) satuan tutupan lahan, yaitu: sawah (sw), tegalan (tg), ruang terbuka hijau (rth), permukiman (pm), hutan (ht), badan air (ba), dan kebun/perkebunan (kb).

Tabel 1.2.
Klasifikasi Tutupan Lahan Kota Kotamobagu

Jenis Penutup Lahan	Luas (Ha)	Persen Luas
Fungsi Lindung	1136.56	16.70
Industri	10	0.15
Kebun/Perkebunan	1201.62	17.66
Permukiman	1216.02	17.66
Ruang Terbuka Hijau	1744	25.62
Sawah	1322.01	19.42
Jasa, Perdagangan dan Perkantoran	176.25	2.595
Jumlah	6806.06	100 %

Sumber: Ranperda RTRW Kota Kotamobagu 2014

Tegalan

Satuan tutupan lahan ini termasuk di dalamnya ladang yang terdapat pada lereng-lereng perbukitan dan daerah dataran. Di beberapa tempat, penduduk membuka perladangan pada lereng-lereng bukit tanpa usaha konservasi, sehingga mempercepat kerusakan lahan. Secara umum tutupan lahan berupa tegalan merupakan pemanfaatan lahan peralihan yang digunakan untuk pertanian lahan kering dengan komoditas pertanian berupa tanaman semusim. Berdasarkan citra satelit, sebagian satuan tutupan lahan berupa tegalan merupakan areal semak atau lahan yang belum dimanfaatkan atau merupakan lahan yang telah selesai dimanfaatkan/panen.

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau merupakan satuan tutupan lahan yang pemanfaatannya diarahkan untuk keseimbangan ekosistem kota, umumnya bentuk dari pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kotamobagu adalah berupa lapangan terbuka, jalur hijau dan taman kota. Pemanfaatan ruang lainnya yang dapat digolongkan sebagai ruang terbuka hijau adalah hutan kota.

Permukiman

Satuan tutupan lahan permukiman merupakan wilayah terbangun yang ada di Kota Kotamobagu. Satuan tutupan lahan ini umumnya mengikuti pola jalan yang ada di Kota Kotamobagu. Pola pemanfaatan ruang permukiman umumnya berselang seling atau bercampur dengan areal pertanian yang ada. Kepadatan areal permukiman umumnya berfariasi dengan tingkat kepadatan sedang hingga jarang. Kepadatan permukiman paling tinggi berada pada jalur-jalur jalan utama. Pesatnya perkembangan permukiman di Kota Kotamobagu selanjutnya harus direncanakan lebih rinci untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan daya dukung lingkungan setempat.

Hutan

Tutupan lahan berupa hutan di wilayah Kota Kotamobagu masih tersedia cukup memadai, terutama di bagian barat, tenggara dan timur laut. Namun melalui citra satelit dan pengamatan lapangan keberadaan hutan ini mulai dirambah dan dimanfaatkan sebagai areal perkebunan oleh masyarakat. Jika areal tutupan lahan berupa hutan ini dikelola sebagai bagian dari ruang terbuka hijau maka saat ini, Kota Kotamobagu memiliki lebih dari 30% luas wilayahnya yang berupa Ruang Terbuka Hijau. Namun kondisi ini bukan tidak mungkin akan berbalik jika tidak ada perencanaan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang yang mengamankan keberadaan RTH di Kota Kotamobagu. Keberadaan

hutan ini sangat penting dan diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama air.

Badan Air

Tutupan lahan berupa badan air umumnya merupakan areal rendah yang terisi oleh air dan bersifat permanen sepanjang waktu. Sebagai contoh bentu-bentuk tutupan lahan berupa badan air adalah; sungai, embung, situ, danau, rawa, kolam dan tambak yang keberadaan dan suplai airnya relatif selalu tetap.

Kebun/Perkebunan

Keberadaan kebun ataupun perkebunan di wilayah Kota Kotamobagu dipahami karena kota ini memiliki potensi di sektor pertanian. Keberadaan kebun campuran maupun perkebunan yang membudidayakan satu atau lebih jenis tanaman produktif sangat banyak terdapat disini. Jenis tanaman yang umumnya dapat dijumpai di wilayah Kota Kotamobagu diantaranya adalah: tanaman kelapa, tanaman buah seperti rambutan, nanas dan komoditas tanaman tahunan lainnya.

Kebun atau perkebunan di wilayah ini diusahakan secara perorangan dan tradisional. Laju pertumbuhan perkebunan nampaknya cukup pesat jika melihat banyaknya areal kebun atau perkebunan yang dapat diamati pada citra satelit yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Perlu perencanaan yang matang terkait dengan pengembangan sektor perkebunan pada waktu mendatang.

Tabel 1.3.
Distribusi Tutupan Lahan Kota Kotamobagu

Kecamatan	Jenis Penutup Lahan	Luas (Ha)
Kotamobagu Utara	Fungsi Lindung	229.33
	Industri	0.00
	Kebun/Perkebunan	214.04
	Permukiman	235.68
	Ruang Terbuka Hijau	422.00
	Sawah	28.70
	Jasa, Perdagangan dan Perkantoran	12.58
Kotamobagu Selatan	Fungsi Lindung	339.50
	Industri	10.00
	Kebun/Perkebunan	215.98
	Permukiman	70.91
	Ruang Terbuka Hijau	411.10
	Sawah	707.16
	Jasa, Perdagangan dan Perkantoran	3.11
Kotamobagu Barat	Fungsi Lindung	44.65
	Industri	0.00
	Kebun/Perkebunan	78.44
	Permukiman	295.07
	Ruang Terbuka Hijau	498.25
	Sawah	58.03
	Jasa, Perdagangan dan Perkantoran	131.61
Kotamobagu Timur	Fungsi Lindung	522.90
	Industri	0.00
	Kebun/Perkebunan	693.16
	Permukiman	616.26
	Ruang Terbuka Hijau	412.13
	Sawah	527.12
	Jasa, Perdagangan dan Perkantoran	29.21

Sumber: Ranperda RTRW Kota Kotamobagu 2014

Potensi Pengembangan Wilayah

Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar atau daerah dibelakangnya (hinterland), melalui pembudayaan sektor atau subsektor basis sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antar daerah. Tujuan utama dari kawasan andalan adalah mempercepat pembangunan.
Kota Kotamobagu yang berdasarkan letaknya memiliki lokasi yang strategis. Kota Kotamobagu terletak pada simpul jalur perdagangan, jasa dan transportasi regional Bolaang Mongondow Raya, dimana daerah Kawasan Bolaang Mongondow Raya tersebut sedang berkembang, terutama Kota Kotamobagu yang menjadi kawasan andalan bagi daerah sekitarnya.

Kota Kotamobagu akan berperan sebagai kota transit bagi para pelaku perjalanan antara Kotabunan, Molibagu, Lolak dan Boroko. Dengan demikian akan mendorong perkembangan sektor perdagangan dan jasa terutama dalam distribusi produk dan potensi lokal. Kota Kotamobagu berperan sebagai terminal (pusat) perdagangan hasil pertanian bagi daerah sekitarnya, penyedia alat-alat dan input bagi kegiatan pertanian, serta sebagai pusat industri pengolahan pertanian. Peran ini didukung oleh keberadaan wilayah sekitar yang sangat potensial bagi pengembangan pertanian, baik tanaman pangan, buah, sayuran, dan hasil kebun lainnya. Keberhasilan peran ini akan membentuk suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Kota Kotamobagu dan Kabupaten di Kawasan Bolaang Mongondow Raya.

Kota Kotamobagu telah di tetapkan sebagai calon Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya dengan melalui analisa dan kajian indikator penilaian calon ibukota suatu provinsi dan sesuai ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktifitas ekonomi, maka Kota Kotamobagu dinilai memenuhi persyaratan sebagai calon ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya. Selain itu

pula dari sisi kajian administrasi, Kota Kotamobagu sebagai calon ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya, telah mendapat Surat Keputusan dari Bupati dan DPRD se Bolaang Mongondow Raya tentang persetujuan penetapan Kota Kotamobagu sebagai Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya.

Sebagai Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya maka di pandang perlu adanya pengembangan wilayah Kota Kotamobagu, meliputi PASSI dan LOLAYAN, merupakan wilayah yang ideal sebagai Ibu Kota Provinsi Bolaang Mongondow Raya, guna peningkatkan Pelayanan dan Kesejahteran Kepada Masyarakat serta Memperkokoh Basis Ekonomi Rakyat. Secara historis,kultur dan budaya, Kerajaan Bolaang Mongondow mempunyai 4 (empat) wilayah adat masing-masing : Passi, Lolayan, Kotabunan dan Bolaang. Passi dan Lolayan merupakan satu wilayah mongondow, yang disatukan dengan bahasa mongondow, serta secara historis,kultur dan budaya menyatu dengan masyarakat Kota Kotamobagu.

Salah satu tujuan pemekaran wilayah yaitu pendekatan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteran masyarakat ; Passi dan Lolayan, ditinjau dari geoposisi strategis menyatu dengan wilayah Kota Kotamobagu. Kota Kotamobagu dalam rangka peningkatan pelayanan kependudukan, merencanakan dalam kurun lima tahun pelaksanaan RPJMD Kota Kotamobagu 2013-2018, akan merencanakan pengembangan wilayah dengan Pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal dan lebih mendekatkan kantor kecamatan lebih dekat dengan masyarakat.

Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

a. Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Kotamobagu

b. Kawasan rawan gerakan tanah dan patahan di wilayah Kota Kotamobagu adalah kawasan yang melintasi Kelurahan Molinow, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Sinindian, Kelurahan Tumobui, Kelurahan Kobo Besar dan Kelurahan Motoboi Besar, seluas + 628 ha

c. Kawasan rawan longsor di wilayah Kota Kotamobagu terletak di Kelurahan Moyag seluas + 273 ha

d. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Gunung Ambang di wilayah Kota Kotamobagu meliputi kawasan di Kelurahan Moyag dan Kelurahan Moyag Todula di Kecamatan Kotamobagu Timur seluas + 322 Hektar.

Demografi

Sebagai daerah otonomi baru setelah terjadi pemekaran tahun 2007, Kota Kotamobagu yang memiliki luas wilayah keseluruhan ± 68,06 km2 (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara) berupaya untuk menyediakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kota Kotamobagu memiliki 4 kecamatan, 18 kelurahan dan 15 desa.

Gambar 1.4.
Piramida Penduduk Kota Kotamobagu 2013

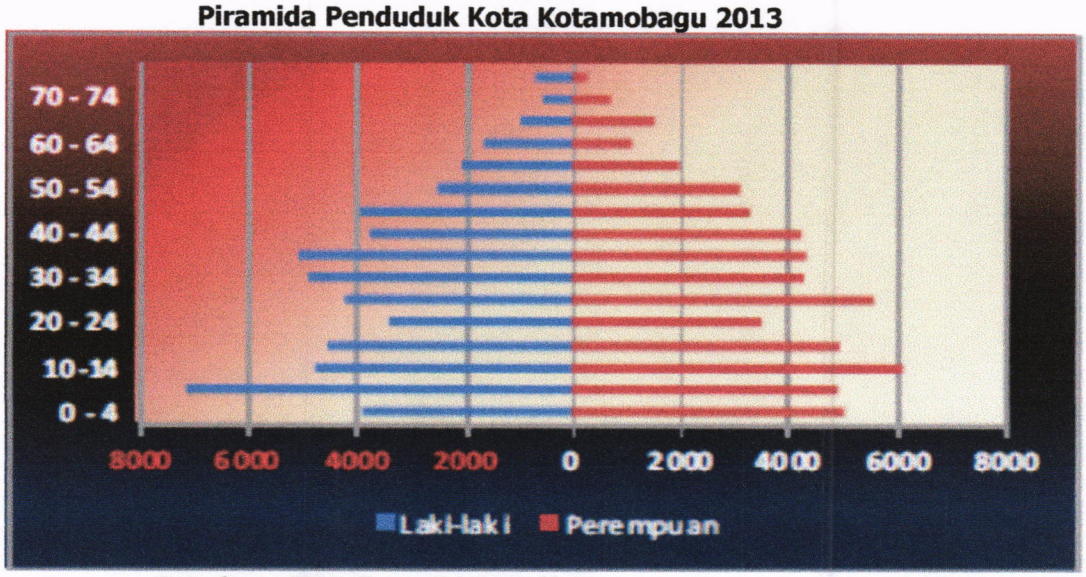

Sumber : BPS Kota Kotamobagu

Penduduk Kota Kotamobagu pada tahun 2013 sebanyak 115.933 orang,sebagian besar penduduk Kota Kotamobagu tergolong usia muda (<35 tahun). Hal ini dapat dilihat pada piramida penduduk yang disajikan pada gambar diatas. Selama periode 2000-2010, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun sebesar 2,14 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun pada periode 1990-2000 (1,19 persen). Hal ini diindikasikan terjadi karena banyaknya orang yang kini tinggal di Kota Kotamobagu akibat dibentuknya wilayah Kotamobagu menjadi salah satu kota di Provinsi Sulawesi dan juga karena kegiatan perekonomian di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.4.
Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu 2013

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. Kotamobagu Selatan	15.775	14.902	30.677
2. Kotamobagu Timur	14.339	13.732	28.071
3. Kotamobagu Barat	20.639	20.077	40.716
4. Kotamobagu Utara	8.299	8.170	16.469
Kota Kotamobagu	**59.052**	**56.881**	**115.933**

Sumber data : www.kotamobagukota.bps.go.id 2014

Berdasarkan kecamatan tampak bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kotamobagu Barat sebaliknya terendah di Kecamatan Kotamobagu Utara dengan komposisi penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

b. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Landasan hukum dibuatnya Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Walikota Kotamobagu atau jika disepakati akan

ditindaklanjuti dengan Penerbitan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Kotamobagu.

URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJATAN KOTA KOTAMOBAGU

TUJUAN 1: TANPA KEMISKINAN: Mengakhiri Kemiskinan dalam Bentuk Dimanapun

Pada Tujuan 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Sub Tujuan Mengakhiri Kemiskinan dalam bentuk dimanapun, khusus untuk Kota Kotamobagu merujuk pada target:

- TARGET 1.2, yaitu Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi lakji-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN:
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Pada Tujuan 2 Target yang direncanakan untuk dicapai,sbb:

- 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dancukup sepanjang tahun.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA:
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Pada Tujuan 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Sub tujuan Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, target yang akan dicapai dalam pembangunan TPB.SDGs Kota Kotamobagu, yakni:

- Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
- Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
- Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
- Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di

negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS:
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Unruk tujuan 4 Pendidikan Berkualitas dengan sub tujuan Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan merrata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua merujuk pada target sbb:

- Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
- Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anakanak dalam kondisi rentan.

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target dari tujuan 5 ini untuk Kota Kotamobagu sbb:

- Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.

- Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK:
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi ysng Berkelanjutan Untuk Semua

Untuk tujuan 6 ini target yang akan dicapai dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah

- Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
- Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU:
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Untuk Tujuan ketujuh Target yang akan dicapai yakni:

- Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

TUJUAN 8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI:
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Berkaitan dengan Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif yang iklusif dan berkelanjutan, adanya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, maka target yang akan dicapai sbb:

- Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
- Target "8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR:
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

Untuk tujuan 8 belum dapat dilaksanakan karena berkaitan dengan perlunya pedataan atas tujuan dimaksud.

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN:
Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Begitu juga dengan tujuan kesepuluh target dan indikator perlu dilakukan penyesuaian dan pengkajian terkait dengan relevansi dari tujuan dimaksud.

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN:
Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Tujuan sebelas seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Kotamobagu berkaitan dengan program 100-0-100 melalui program Kotaku. Namun sehubungan dengan masih melakukan penyesuaian pelaksanaan program maka akan ditindaklanjuti dalam capaian tujuan yang akan datang.

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB:
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Tujuan duabelas masih perlu dilakukan pendataan dan pengkajian atas maksud dari tujuan ini dengan target dan indikator yang diperlukan.

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM:
Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Untuk tujuan tigabelas diperlukan juga untuk melakukan pengkajian dan pendataan terkait target dan indikator yang ingin dicapai.

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN:
Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumberdadya Kelautan dan Samudra Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kota Kotamobagu tidak memiliki wilayah kelautan.

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN:
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem

Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Tujuan limabelas diperlukan adanya pendataan atas target dan indikator yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan gambaran umum Kota Kotamobagu.

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH:
Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif disemua Tingkatan

Tujuan enambelas diperlukan adanya pendataan atas target dan indikator yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan gambaran umum Kota Kotamobagu.

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN:
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Untuk tujuan ketujuhbelas target yang untuk kondisi saat ini dapat dicapai yakni:

- Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara -Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

1.2. Permasalahan dan Tantangan

Permasalahan:

Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diperlukan adanya komitmen masing-masing Perangkat Daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan untuk dapat mengorgansasikan data-data yang diperlukan serta sudah seharusnya melakukan peninjauan kembali atas semua dokumen perencanaan untuk dapat disesuaikan dengan meta-data yang tercantum dalam pepres 59 tahun 2017 atau meta-data lengkap sebagaimana menjadi rujukan dalam upaya pengumpulan data. Hal ini penting agar dalam mengisi indikator dapat lebih mudah dan terukur.

Tantangan:

Tantangan yang akan dihadapi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah ini yakni perlunya penguatan kemampuan masing-masing petugas perencana untuk dapat merancang setiap target dan indikator dalam kerangka berpikir program dan kegiatan. Perlunya kemampuan untuk membahasakan setiap indikator kedalam bahasa-bahasa program dan kegiatan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

2.1. Uraian tentang Tujuan, Target dan Indikator TPB

TUJUAN 1: TANPA KEMISKINAN: Mengakhiri Kemiskinan dalam Bentuk Dimanapun

Pada Tujuan 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Sub Tujuan Mengakhiri Kemiskinan dalam bentuk dimanapun, khusus untuk Kota Kotamobagu merujuk pada target:

- TARGET 1.2, yaitu Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi lakji-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
    - Indikator 1.2.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
- 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
    - Indikator 1.3.1. Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.
    - Indikator 1.3.1.c. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
- Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang

sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

- Indikator 1.4.1. Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.
- Indikator 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
- Indikator 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. "
- Indikator 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
- Indikator 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
- Indikator 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
- Indikator 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD
- Indikator 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
- Indikator 1.4.1.(I) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA
- Indikator 1.4.1.(j) Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN:
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Pada Tujuan 2 Target yang direncanakan untuk dicapai dengan indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan dimaksud,sbb:

- 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dancukup sepanjang tahun.
    - Indikator 2.1.1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
    - Indikator 2.1.1.a. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA:
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Pada Tujuan 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Sub tujuan Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, target yang akan dicapai dalam pembangunan TPB.SDGs Kota Kotamobagu, yakni:

- Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
    - Indokator 3.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI)
- Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
    - 3.2.1. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
    - 3.2.2. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
    - 3.2.2.(a). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
    - 3.2.2.(b). Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.

- Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
    - Indikator 3.3.1. Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.
    - Indikator 3.3.1.(a). Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
    - Indikator 3.3.2. Kejadian TB per 1000 orang
- Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
    - Indikator 3.7.1. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
- Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.
    - Indikator 3.c.1.Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS:
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Unruk tujuan 4 Pendidikan Berkualitas dengan sub tujuan Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan merrata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua merujuk pada target dan indikator sbb:

- Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa

dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

- Indikator 4.1.1. (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat."
- Indikator 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
- Indikator 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/sederajat.
- Indikator 4.1.1. (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.

- Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
  - Indikator 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.
- Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anakanak dalam kondisi rentan.
  - Indikator 4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat;
  - Indikator 4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs//sederajat;
  - Indikator 4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat;
  - Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target dan indikator dari tujuan 5 ini untuk Kota Kotamobagu sbb:

- Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
    - Indikator 5.1.1. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
- Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
    - Indikator 5.2.1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
    - Indikator 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
- Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
    - 5.5.1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah (tiap lima tahun).

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi ysng Berkelanjutan Untuk Semua

Untuk tujuan 6 ini target yang akan dicapai dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bersama indikatornya adalah

- Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

- Indikator 6.1.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.
- Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

- Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
  - Indikator 6.3.1. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU:
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Untuk Tujuan ketujuh Target yang akan dicapai dengan indikatornya yakni:

- Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
  - Indikator 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita. (Rumah Tangga).

TUJUAN 8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI:
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Berkaitan dengan Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif yang iklusif dan berkelanjutan, adanya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang

layak untuk semua, maka target yang akan dicapai bersama indikatornya adalah sbb:

- Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
    - Indikator 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.
    - Indikator 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektorpertanian.
- Target "8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua."
    - Indikator "8.10.1. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa."

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR:
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

Untuk tujuan 8 belum dapat dilaksanakan karena berkaitan dengan perlunya pedataan atas tujuan dimaksud.

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN:
Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Begitu juga dengan tujuan kesepuluh target dan indikator perlu dilakukan penyesuaian dan pengkajian terkait dengan relevansi dari tujuan dimaksud.

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN:
Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Tujuan sebelas seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Kotamobagu berkaitan dengan program 100-0-100 melalui program Kotaku. Namun sehubungan dengan masih melakukan penyesuaian pelaksanaan program maka akan ditindaklanjuti dalam capaian tujuan yang akan datang.

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB:
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Tujuan duabelas masih perlu dilakukan pendataan dan pengkajian atas maksud dari tujuan ini dengan target dan indikator yang diperlukan.

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM:
Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Untuk tujuan tigabelas diperlukan juga untuk melakukan pengkajian dan pendataan terkait target dan indikator yang ingin dicapai.

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN:
Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumberdadya Kelautan dan Samudra Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kota Kotamobagu tidak memiliki wilayah kelautan.

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN:
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Tujuan limabelas diperlukan adanya pendataan atas target dan indikator yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan gambaran umum Kota Kotamobagu.

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH: Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif disemua Tingkatan

Tujuan enambelas diperlukan adanya pendataan atas target dan indikator yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan gambaran umum Kota Kotamobagu.

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Untuk tujuan ketujuhbelas target dan indikator yang untuk kondisi saat ini dapat dicapai yakni:

- Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara -Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
    - Indikator 17.6.2.Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.
    - Indikator 17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.

2.2. Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Tujuan TPB

Berdasarkan dokumen perencanaan RPJMN 2015-2019 arah dan kebijakan terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sbb:

2.2.1. Tanpa Kemiskinan:

- Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan
  - Selama kurun waktu lima tahun, pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin (kurang mampu) sebanyak 4,25 juta orang. Pada tahun 2009, persentase penduduk kurang mampu masih mencapai 14,15 persen (32,53 juta orang berada di bawah garis kemiskinan) dan pada bulan Maret 2014 angka kemiskinan menurun menjadi 11,25 persen atau sebanyak 28,28 juta orang.
  - Strategi penurunan kemiskinan yang diterapkan selama periode 2010-2014 adalah mengupayakan kebijakan yang terintegrasi (pro-poor, pro-job, pro-growth) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan kemiskinan dicapai melalui berbagai kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui empat kelompok program, yakni 1) bantuan dan perlindungan sosial, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil, 4) program pro rakyat.
- Permasalahan dan Isu Strategis
  - Ketimpangan pembangunan merupakan permasalahan multidimensi, yaitu bukan hanya menyangkut persoalan terbatasnya pendapatan atau aspek moneter untuk memenuhi penghidupan yang layak, melainkan juga aspek non-moneter seperti geografis wilayah yang terkait erat dengan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan.

- Ketimpangan juga dapat dilihat berdasarkan indeks gini yang pada tahun 2013 mencapai angka 0,41. Pada kondisi tersebut, pertumbuhan konsumsi per kapita kelompok penduduk pada 40 persen terbawah hanya tumbuh sekitar 2 persen (BPS dan TNP2K, 2013). Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per kapita rumah tangga kelas menengah (persentil 40-80) tumbuh relatif lebih tinggi (antara 2-4,87 persen), meskipun masih jauh di bawah pertumbuhan konsumsi kelompok berpendapatan tertinggi yang tumbuh di atas 4,87 persen atau di atas rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga nasional.
- Peningkatan ketimpangan dan perlambatan penurunan kemiskinan selama empat tahun terakhir disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
  - Pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif:
    - Kondisi makro ekonomi dalam lima tahun terakhir yang tidak stabil akibat adanya krisis ekonomi global yang membuat pertumbuhan industri secara nasional relatif melambat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional cenderung melambat.
    - Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya terjadi pada sektor tertentu, yakni sektor industri dan jasa. Kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan rendah berkurang secara nyata, sehingga pertumbuhan industri tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas.
    - Kondisi booming kenaikan harga internasional dari komoditas ekspor utama Indonesia seperti komoditas perkebunan (crude palm oil) dan sumber daya alam (misalnya batu bara) yang terjadi pada 10 tahun

terakhir. Keuntungan ini umumnya lebih dinikmati golongan pemilik modal karena sifatnya yang padat modal atau yang memiliki keterampilan tinggi.

- Kurangnya perlindungan terhadap usaha mikro dan kecil melalui kebijakan impor komoditas yang sama dengan yang dapat dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil akan mempengaruhi secara signifikan terhadap keberlangsungan usaha mikro dan kecil tersebut.
- Berkurangnya kebutuhan tenaga kerja kurang terampil dimana terjadi transformasi struktur pasar tenaga kerja yang lebih mengarah pada sektor jasa yang lebih dinikmati oleh penduduk di desil terkaya (Susenas 2012, diolah oleh Bank Dunia)
- Kurangnya akses terhadap sarana-prasarana pendukung ekonomi mempengaruhi daya saing kelompok menengah kebawah. Hal ini berdampak pada terbatasnya produktivitas masyarakat miskin dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.
- Tingkat pertumbuhan penduduk miskin relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk kelompok ekonomi menengah ke atas. Hal ini ditunjukkan dengan data SDKI (2012), dimana angka fertilitas pada kuantil terendah (TFR = 3,2) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kuantil tertinggi (TFR = 2,2). Dengan kondisi tingkat pendapatan yang lebih rendah dan jumlah anggota keluarga yang banyak maka pertumbuhan konsumsi per kapita menjadi lebih rendah.
- Keterbatasan kepemilikan lahan dan aset produktif yang membatasi peningkatan produksi dan skala

usaha yang mengakibatkan rendahnya pendapatan mereka.

- Perlindungan sosial yang belum komprehensif
  - Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, namun sebagian besar penduduk tersebut masih menghadapi kerentanan terhadap berbagai risiko. Risiko siklus hidup yang dihadapi seperti sakit, disabilitas dan usia lanjut, serta berbagai guncangan lainnya seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau dampak negatif perubahan iklim. Pada penduduk kurang mampu, berbagai risiko tersebut menyebabkan kemiskinan kronis atau kesulitan untuk keluar dari kemiskinan. Menurut data Susenas (dari berbagai tahun), diperkirakan 4,5 juta dari 6 juta rumah tangga termiskin menetap dalam kemiskinan selama 3 tahun lebih, sedangkan 1,5 juta rumah tangga termiskin terancam selalu dalam kondisi kemiskinan. Untuk itu, diperlukan serangkaian kebijakan dan program perlindungan yang memberi peluang bagi penduduk kurang mampu dan rentan untuk memiliki kapasitas mengelola risiko dan menginvestasikan diri dan anakanaknya agar memiliki kehidupan yang lebih baik.
  - Pelaksanaan program-program perlindungan sosial saat ini masih terbatas, belum terkoordinasi dengan baik dan belum memiliki skema yang efektif. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) membuka peluang dikembangkannya skema perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Untuk

jaminan kesehatan, pemerintah memberi bantuan iuran bagi penduduk kurang mampu. Saat ini, tercatat 88,1 juta jiwa penduduk kurang mampu, termasuk 1,7 juta jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah memperoleh Kartu Indonesia Sehat dan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, cakupan saat ini masih terfokus pada pekerja sektor formal yang bervariasi sehingga belum mampu mewujudkan keadilan sosial. Sebagian besar dari pekerja yang tidak tercakup jaminan sosial ketenagakerjaan adalah pekerja bukan penerima upah.

- Perlindungan sosial juga ditujukan bagi pengembangan pemenuhan hak dasar dan lingkungan yang inklusif bagi kelompok masyarakat marjinal yang menghadapi risiko. Kelompok ini terdiri dari penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, fakir miskin, dan kelompok marjinal lainnya seperti masyarakat adat, orang dengan HIV AIDS (ODHA), mantan narapidana, tuna sosial, serta korban kekerasan, eksploitasi dan NAPZA. Risiko dan kerentanan juga dihadapi kelompok masyarakat marjinal usia produktif. Penyandang disabilitas misalnya, sebagian besar bekerja pada sektor informal karena menghadapi eksklusi sosial.
- Melalui berbagai asistensi sosial, selama ini pemerintah telah memberikan bantuan tunai, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan

bagi kelompok tersebut. Tantangan utama pelaksanaan program asistensi sosial saat ini adalah keberagaman jenis kerentanan dari berbagai kelompok penduduk, serta lemahnya pendataan. Pada tahun 2013 sebanyak 24,7 juta anak berada di dalam keluarga kurang mampu dan rentan, dan menghadapi risiko ketimpangan, ketelantaran, eksploitasi, dan kekerasan. Demikian pula pada kelompok lansia yang berjumlah 11,98 juta (2012), sebagian besar merupakan perempuan yang memiliki usia hidup lebih lama namun dengan kondisi fisik yang rentan. Saat ini baru 5,9 juta jiwa (2013) lansia kurang mampu yang telah memiliki jaminan kesehatan. Sebagian besar dari mereka belum memiliki jaminan pensiun/hari tua sehingga terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghadapi risiko ketelantaran.

- Ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar
  - Ketidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar atau karena adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga berdampak pada pelambatan penurunan kemiskinan. Hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu menyangkut hak untuk mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, kepemilikan rumah yang layak, penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi layak, dan akses terhadap air bersih. Walaupun pada umumnya

akses terhadap pelayanan dasar telah meningkat, namun ketimpangan akses pelayanan dasar antar kelompok pendapatan masih cukup besar.

- Pertama, kepemilikan akte kelahiran adalah persyaratan penting dan langkah awal untuk dapat mengakses bantuan pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Namun, berdasarkan data Susenas (2013), rata-rata kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun paling banyak terdapat di daerah perkotaan pada kelompok 60% terkaya dibandingkan daerah perdesaan dengan kondisi penduduk 40% termiskin. Lemahnya akses terhadap identitas hukum berakibat pada ketimpangan kesempatan penduduk kurang mampu dan marjinal dalam memperoleh akses penghidupan yang layak.
- Kedua, ketimpangan dalam pelayanan dasar yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Ketimpangan terbesar antar kelompok pendapatan masih terjadi pada cakupan persalinan di fasilitas kesehatan, angka partisipasi sekolah pada anak usia 16-18 tahun dan cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Keterbatasan masyarakat kurang mampu dalam mengakses pelayanan dasar tentunya berdampak pada tingkat kesejahteraannya, terutama status kesehatan dan tingkat pendidikannya.

▪ Terbatasnya akses masyarakat kurang mampu dalam mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan.

- Secara umum, masyarakat kurang mampu sulit meningkatkan penghidupannya karena memiliki karakteristik sebagai berikut: (i) memiliki keterbatasan dalam jejaring untuk mengakses pekerjaan dan permodalan; (ii) bekerja di sektor informal dan/atau memiliki penghasilan yang bersifat harian atau musiman dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi; (iii) rentan terhadap guncangan (shock);
- (iv) belum memadainya kepemilikan aset produksi, seperti lahan dan perahu; (v) terbatasnya keterampilan dan kemampuan untuk memberi nilai tambah pada hasil produksi; (vi) tidak memiliki keahlian lain ketika pekerjaan utama terhambat.

- Isu strategis dalam percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan pada periode 2015-2019 adalah:
  - pertumbuhan ekonomi yang inklusif terutama bagi masyarakat kurang mampu dan rentan,
  - peningkatan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk rentan dan pekerja informal,
  - perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu dan rentan, dan
  - pengembangan penghidupan berkelanjutan.

2.3. Program dan Kegiatan Berdasarkan Tujuan TPB

Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan basis data yang ada untuk penyusunan RAD TPB sbb:

TUJUAN TPB	PROGRAM	KEGIATAN
TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN	Pengentasan Kemiskinan Masyarakat	Pengentasan Kemiskinan berdasarkan jenis kelamin dan usia
TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN	Penanggulangan Kelaparan bagi semua orang	Penyediaan dan Pelayanan makanan bergizi dan Kecukupan makan.
TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	Penyuluhan Keselamatan Ibu Hamil dan Melahirkan
	Penurunan Angka Kematian Balita	Kegiatan 1: Penguatan Pelayanan Posyandu Kegiatan 2: Penyuluhan Imunisasi Balita
	Pencegahan Penyakit Menular	Kegiatan 1: Penyuluhan Pencegahan HIV Kegiatan 2: Pelayanan Kesehatan Penyakit TB
	Penguatan Pelayanan KB	Kegiatan 1: Penyuluhan Pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur 15-49 tahun
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kegiatan 1: Pemetaan Kebutuhan tenaga kesehatan Kegiatan 2: Pelatihan dan Pengembangan Kopetensi Tenaga Kesehatan
TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	Pendidikan untuk Semua: Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun	Kegiatan 1: Pendidikan Dasar Satuan Pendidikan Tingkat SD/MI/Sederajat Kegiatan 2: Pendidikan Dasar Satuan Pendidikan Tingkat SMP/MT/Sederajat Kegiatan 3: Pendidikan Dasar Satuan Pendidikan Tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat Kegiatan 4. Pembelajaran Pendidikan PAKET A,B,C
TUJUAN TPB	PROGRAM	KEGIATAN
TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER	Penguatan Kelembagaan PPPA dan P2TP2A	Kegiatan 1: Penguatan Kelembagaan PPPA Kegiatan 2: Penguatan Kelembagaan P2TP2A
	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Kegiatan 1: Penguatan Kaum Perempuan atas Hak-Hak Sosial dan Politik
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	Penyediaan Layanan Air Minum Layak	Kegiatan 1: Pereluasan jaringan layanan air minum secara aman
	Pengelolaan Limbah Cair Ramah Lingkungan dan Aman	Kegiatan 1: Pemetaan potensi limbah cair Kegiatan 2: Pemantauan Pengelolaan limbah cair
TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	Ketersediaan Listrik bagi Masyarakat	Kegiatan 1: Penjangkauan layanan listrik masyarakat

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	Peningkatan Lapangan Kerja bagi kelompok usia kerja	Kegiatan 1:Penguatan Ketenagakerjaan sektor formal dan informal
	KIE Layanan Perbankan dan Lembaga Keuangan	Kegiatan 1: Sosialisasi Pemanfaatan layanan Perbankan dan Lembaga Keuangan
TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR		
TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN		
TUJUAN 11. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB		
TUJUAN 12. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN:		
TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM		
TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUT		
TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN		
TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	Peningkatan Kualitas Anggota Legislatif Perempuan	Kegiatan 1: Penguatan Anggota Legislatif Perempuan
	Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Kegiatan 2.1: Penguatan Kebijakan Eselonisasi keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan
TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	Peningkatan Kualitas Anggota Legislatif Perempuan	Kegiatan 1: Pemanfaatan Broadband Internet secara benar dan aman

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) diperlukan adanya Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam rangka efektivitas dan upaya peninjauan kembali atas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

   Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan.

   Hasil evaluasi seharusnya dapat menyediakan data dan informasi tentang efisiensi, efektifitas, kebutuhan, manfaat dan dampak program atau kegiatan sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya. Untuk itu perlu disusun mekanisme Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pemantauan dan evaluasi berjalan dengan baik dan hasil dari pemantauan evaluasi bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan dan proses penyusunan perencanaan danpenganggaran pada periode berikutnya.

   Untuk efktivitas pemantauan dan evaluasi merujuk pada *template* matriks pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kotamobagu sbb:

MATRIKS PEMANTAUAN DAN MONITORING PELAKSANAAN

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN .....

POKJA .....

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN REALISASI TARGET TAHUNAN					DEFINITIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA) TAHUN (Rp. JUTA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2018	2019	2020	2021	2022			

Mengetahui,
Kepala Inspektorat,

.....

..... 20.....
Kepala Perangkat Daerah

.....

2. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme Pelaporan didasarkan pada isian Matriks Pemantauan dan Evaluasi dari Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Pelaporannya disampaikan secara berjejang yang ditujukan kepada:

a. Kepala Bappenas ub. Sekretariat TPB/SDGs sebagai laporan

b. Walikota sebagai laporan

c. Sekretaris Daerah sebagai laporan

d. Inspektorat sebagai Pembina Pengawasan Pelaksanaan TPB/SDGs

e. Kepala Bappelitbangda sebagai fungsi Pemantauan dan Monitoring

Sistematika Pelaporan:

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (Matriks Evaluasi) (Berdasarkan Tujuan TPB)

BAB III : PENUTUP

Ditandatangi oleh Kepala Bapelitbangda sebagai Koordinator dan masing-masing POKJA

3. Tanggungjawab masing-masing Platform

   Masing-masing Pokja bertanggungjawab dan mendatangani atas laporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4. Waktu Pelaksanaan

   Waktu Pelaksanaan Pelaporan berdasarkan pelaporan B1 (Bulan ke 1), B3 (Bulan ke 3), B6 (Bulan ke 6), B9 (Bulan ke 9) dan B12 (Bulan ke 12-sebagai laporan tahunan)

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Kotamobagu merupakan dokumen perencanaan awal dan masih membutuhkan evaluasi dan peninjauan kembali dengan berbasis pada meta-data SDGs, sehingga dalam pelaksanaannya dapat semakin terukur dan terencana. Selain itu pula Dokumen Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Kota Kotamobagu akan lebih tersinkronisasi apabila dokumen data RPJMD dan RKPD dapat disesuaikan langsung dengan meta-data SDGs. Hal ini penting karena TPB/SDGs berlaku sampai 2030. Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Kota Kotamobagu harus diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Lampiran:

1. Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
2. Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Kotamobagu
3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Kotamobagu

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ir. TATONG BARA

LAMPIRAN :

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) KOTA KOTAMOBAGU

MATRIKS RENCANA AKSI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA) TAHUN (Rp. JUTA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR	1.2.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.									
PROGRAM 1:	Pengentasan Kemiskinan Masyarakat									
Kegiatan 1: Pengentasan Kemiskinan berdasarkan jenis kelamin dan usia	1.1.Pemberdayaan penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengentas kemiskinan	%	5,5	5,8	6,1	6,5	6,8	750.000.000	APBD	Bappelitbangda, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja
	1.2. Melakukan pemetaan dan evaluasi anggota keluarga miskin berdasarkan jenis kelamin	%	15	25	35	45	55	1.500.000.000	APBD	Bappelitbangda, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja
INDIKATOR	1.3.1. Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.									
Kegiatan 1: Pemberian Jaminan Sosial	1.1. Pemberian Jaminan Kesehatan berdasarkan usia dan jenis kelamin, kelompok ABK	%	70	80	100	100	100	PM	APBN	BPJS
	1.2. Pelatihan bagi kelompok pengangguran dan penyandang disabilitas	%	10	15	20	25	30	450.000.000,00	APBD	Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan
	1.3. Pemberian Jaminan Persalinan bagi ibu hamil	%	15	17	19	22	24	PM	APBN	BPJS
	1.4. Pemberian Pelayanan antenatal ke 4	%	100	100	100	100	100	PM	APBN	BPJS
	1.5. Pemberian Jaminan Asuransi Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	PM	SWASTA	SWASTA
INDIKATOR	1.4.1. Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.									
Kegiatan 1: Pencegahan Kematian Ibu Melahirkan	1.1. perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	100	100	100	100	100	450.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2: Pelayanan Imunisasi Lengkap	2.1. anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	100	100	100	100	100	450.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan

Kegiatan 3: Pelayanan Kontrasepsi bagi pasangan usia subur	3.1. penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	%	60	65	70	75	80	450.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan KB
Kegiatan 4: Program Hidup Bersih dan Seha	4.1. rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	100	100	100	100	100	450.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 5: Program Pendidikan untuk semua	5.1. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	100	100	100	100	100	70.000.000.000,00	APBD	Dinas Pendidikan
	5.2. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	80	82	84	86	88	80.000.000.000,00	APBD	Dinas Pendidikan
	5.3. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA	%	80	82	84	86	88	120.000.000.000,00	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 6: Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran	6.1. Tersedianya penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	%	100	100	100	100	100	-	APBN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR	2.1.1.a. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.									
PROGRAM 1:	Penanggulangan Kelaparan bagi semua orang									
Kegiatan 1: Penyediaan dan Pelayanan makanan bergizi dan Kecukupan makan	1.1. Menurunnya kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	100	100	100	100	100	120.000.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan KB

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR	3.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI)									
PROGRAM 1:	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)									
Kegiatan 1: Penyuluhan Keselamatan Ibu Hamil dan Melahirkan	1.1. Kesadaran ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan khususnya cakupan K4	%	100	100	100	100	100	80.000.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
	1.2. Terlatihnya Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Nifas	%	100	100	100	100	100	80.000.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR	3.1.1. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran									
PROGRAM 1:	Penurunan Angka Kematian Balita									
Kegiatan 1: Penguatan Pelayanan Posyand	1.1. Terlatihnya petugas Posyandu dalam pelayanan kesehatan balita	%	100	100	100	100	100	80.000.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan KB
Kegiatan 2: Penyuluhan Imunisasi Balita	2.1. Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.									

	2.2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 2.3. tercapainya kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	100	100	100	100	100	70.000.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR	3.3.1. Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.									
PROGRAM	Pencegahan Penyakit Menular									
Kegiatan 1: Penyuluhan Pencegahan HIV	1.1. Menurunnya penderita infeksi baru HIV	%	60	65	70	75	80	750.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2: Pelayanan Kesehatan Penyakit	2.1. Menurunnya Penderita TB per 1000 orang	%	100	100	100	100	100	PM	BPJS	BPJS Kesehatan
INDIKATOR	3.7.1. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern									
PROGRAM	Penguatan Pelayanan KB									
Kegiatan 1: Penyuluhan Pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur 15-49 tahun	1.1. Meningkatnya perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	%	100	100	100	100	100	70.000.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR	3.c.1.Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan									
PROGRAM	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan									
Kegiatan 1: Pemetaan Kebutuhan tenaga kesehatan	1.1. Terpetakannya kebutuhan riil tenaga kesehatan	%	70	75	80	85	90	150.000.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2: Pelatihan dan Pengembangan Kopetensi Tenaga Kesehatan	2.1. Terlatihnya kopetensi tenaga kesehatan	%						700.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan

TUJUAN 4. PENDIDIKAM BERKUALITAS

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR	4.1.1. (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat, APK SMP/MT/Sederajat, SMA/SMK/MA/Sederajat									
PROGRAM 1:	Pendidikan untuk Semua: Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun									
Kegiatan 1: Pendidikan Dasar Satuan Pendidikan Tingkat SD/MI/Sederajat	1.1. Meningkatnya Angka Pasrtisipasi Sekolah SD/MI/Sederajat	%	100	100	100	100	100	70.000.000.000,00	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 2: Pendidikan Dasar Satuan Pendidikan Tingkat SMP/MT/Sederajat	2.1. Meningkatnya Angka Pasrtisipasi Sekolah SMP/MT/Sederajat	%	80	82	84	86	88	80.000.000.000,00	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 3: Pendidikan Dasar Satuan Pendidikan Tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat	3.1. Meningkatnya Angka Pasrtisipasi Sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat	%	80	82	84	86	88	120.000.000.000,00	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 4. Pembelajaran Pendidikan PAKET A,B,C	4.1. Terlayaninya kesempatan belajar bagi anak-anak, perempuan dan laki-laki disegala usia	%	20	25	30	35	40	700.000.000,00	APBD	Dinas Pendidikan

	Meningkatnya Angka Melek Aksasra penduduk ≥ dari 15 tahun									
TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR	5.1.1. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan									
PROGRAM 1:	Penguatan Kelembagaan PPPA dan P2TP2A									
Kegiatan 1: Penguatan Kelembagaan PPPA	1.1. Diterbitkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait dengan Kebijakan yang Responsif Gender dan mendukung pemberdayaan perempuan	dokumen	2	4	2	-	-	300.000.000,00	APBD	DPPPA
Kegiatan 2: Penguatan Kelembagaan P2TP2	2.1. Terdatanya perempuan dewasa dan anakperempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosial oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 tahun terakhir	%	100	100	100	100	100	750.000.000,00	APBD	DPPPA
	2.2. Meningkatnya korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	45	60	75	80	85	750.000.000,00	APBD	DPPPA
INDIKATOR	5.5.1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah (tiap lima tahun)									
PROGRAM 1:	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam Pengambilan Keputusan									
Kegiatan 1: Penguatan Kaum Perempuan atas Hak-Hak Sosial dan Politik	1.1. Meningkatnya jumlah kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah (tiap lima tahun)	%	100	100	100	100	100	750.000.000,00	APBD	DPPPA
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR	5.1.1. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan									
PROGRAM 1:	Penyediaan Layanan Air Minum Layak									
Kegiatan 1: Pereluasan jaringan layanan air minum secara aman	1.1. Meningkatnya pengguna layanan air minum yang dikelola secara aman									
	1.2. meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.									
INDIKATOR	6.3.1. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.									
PROGRAM 1:	Pengelolaan Limbah Cair Ramah Lingkungan dan Aman									
Kegiatan 1: Pemetaan potensi limbah cair	1.1. Terpetakannya potensi limbah cair yang diolah secara aman									

Kegiatan 2: Pemantauan Pengelolaan limbah cair	1.2. Adanya Pengelolaan limbah cair yang ramah lingkungan dan aman									
TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR	7.1.1. Rasio elektrifikasi.									
PROGRAM 1:	Ketersediaan Listrik bagi Masyarakat									
Kegiatan 1: Penjangkauan layanan listrik masyarakat	1.1. Meningkatnya Konsumsi listrik per kapita. (Rumah Tangga)									
TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.									
PROGRAM 1:	Peningkatan Lapangan Kerja bagi kelompok usia kerja									
Kegiatan 1:Penguatan Ketenagakerjaan sektor formal dan informal	1.1. Meningkatnya angka partisipasi tenagakerja di sektor formal									
	1.2. Meningkatnya kualitas ketenagakerjaa sektor informal pertanian									
INDIKATOR	8.10.1. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000									
PROGRAM 1:	KIE Layanan Perbankan dan Lembaga Keuangan									
Kegiatan 1: Sosialisasi Pemanfaatan layanan Perbankan dan Lembaga Keuangan	1.1. Meningkatnya penggunaan fasilitas layanan Perbankan dan ATM									
TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR										
PROGRAM 1:										
TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR										
PROGRAM 1:										
TUJUAN 11. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI	SUMBER	INSTANSI PELAKSANA

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN 5 (LIMA)	PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR										
PROGRAM 1:										
TUJUAN 12. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN:										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR										
PROGRAM 1:										
TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR										
PROGRAM 1:										
TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUT										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR										
PROGRAM 1:										
TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR										
PROGRAM 1:										
TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).									
PROGRAM 1:	Peningkatan Kualitas Anggota Legislatif Perempuan									
Kegiatan 1: Penguatan Anggota Legislatif Perempuan	1.1. Meningkatnya kualitas Anggota Legislatif Perempuan	%	100	100	100	100	100	750.000.000,00	APBD	DPPPA
INDIKATOR	16.7.1. (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II).									
PROGRAM	Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pengambilan Keputusan									

Kegiatan 2.1: Penguatan Kebijakan Eselonisasi keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan	2.1. Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II).	%	100	100	100	100	100	750.000.000,00	APBD	DPPPA
TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN										
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		**SATUAN**	**TARGET TAHUNAN**					**INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 (LIMA)**	**SUMBER PENDANAAN**	**INSTANSI PELAKSANA**
			2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
INDIKATOR	17.6.2.Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.									
PROGRAM 1:	Peningkatan Kualitas Anggota Legislatif Perempuan									
Kegiatan 1: Pemanfaatan Broadband Internet secara benar dan aman	1.1. Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.	PERORANGAN	93000	95000	98000	110000	125000	PM	PERORANGAN	PROVIDER
	1.2. Bertambahnya penduduk terlayani mobile broadband	PERORANGAN								

LAMPIRAN :

DAFTAR TUJUAN, TARGET DAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) KOTA KOTAMOBAGU

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN: Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun								
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 1:								
TARGET 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	5,09% (2017) Bappeda Provinsi Sulut	4,89	4,69	4,49	4,29	4,09	Bappelitbangda, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1. Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	8.63 % (2017) Diolah berdasarkan target RPJMD	9,63	12,63	15,63	18,63	20,63	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja
	1.3.1.c. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	70.2 % (2017)	78,50	86,50	96,50	98,50	99,00	Dinas Sosial
1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.							
	1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	93 % (2017)	95	97	100	100	100	Dinas Kesehatan
	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	100 % (2017)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan KB
	1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	70 % (2017)	72	75	78	81	85	Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan KB
	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	83 % (2017)	85	87	89	95	100	Dinas PUPR
	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	1750 rumahtangga (2017)	1750	1750	1750	1750	1750	Dinas PUPR
	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD	92.37 % (2013)	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	72.51 % (2013)	73	75	78	80	85	Dinas Pendidikan
	1.4.1.(I) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA	65.87(2013)	70,71	70,02	71,71	73,71	75,71	Dinas Pendidikan
	1.4.1.(j) Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	90 (2017)	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan								
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 2:								
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap	2.1.1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).							
	2.1.1.a. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	3 % (2013)	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan KB

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA:
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 3:								
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI)	5 (2013)	0	0	0	0	0	
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000	3.2.1. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	14	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
	3.2.2. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.							
	3.2.2.(a). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	14 (2013)	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
	3.2.2.(b). Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	81.82 (2013)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.1. Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	70 (2017)	70	70	70	70	70	Dinas Kesehatan
	3.3.1.(a). Prevalensi HIV pada populasi dewasa.							
	3.3.2. Kejadian TB per 1000 orang	360 (2013)	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	58.1 (2013)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan KB

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia								
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 3:								
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI)	5 (2013)	0	0	0	0	0	
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000	3.2.1. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	14	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
	3.2.2. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.							
	3.2.2.(a). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	14 (2013)	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
	3.2.2.(b). Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	81.82 (2013)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.1. Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	70 (2017)	70	70	70	70	70	Dinas Kesehatan
	3.3.1.(a). Prevalensi HIV pada populasi dewasa.							
	3.3.2. Kejadian TB per 1000 orang	360 (2013)	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	58.1 (2013)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan KB

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS:
Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Menjamin Kualitas

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 4:								
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1. (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	104.23 (2012)	106,4	104,6	102,2	101,14	101,13	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	89.88 (2012)	110,4	112,2	114,4	116,8	118,1	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/sederajat.	88.34 (2012)	114,00	117,8	118,2	118,9	119,0	Dinas Pendidikan
	4.1.1. (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	9.18 (2012)	12	12	12	12	12	Dinas Pendidikan
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK /MA/sederajat.	88.34 (2012)	114,00	117,8	118,2	118,9	119,0	Dinas Pendidikan
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anakanak dalam kondisi rentan.	4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat;	92.37 (2012)	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs//sederajat;	72.51 (2012)	95,10	97,00	98,23	99,30	99,45	Dinas Pendidikan
	4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat;	65.87 (2012)	80,5	90,5	93,23	94,3	94,45	Dinas Pendidikan
	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99.66 (2012)	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan								
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 5:								
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	70 % (2013)	100	100	100	100	100	DPPPA
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0.2% (2012)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	DPPPA
	5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	60% (2012)	20	15	10	5	5	DPPPA
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah (tiap lima tahun)	12 % (2014)	12	30	30	30	30	DPPPA

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK: Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi ysng Berkelanjutan Untuk Semua								Menjamin
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 6:								
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	55 % (2012)	100	100	100	100	100	PDAM, Dinas PUPR
	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	55 % (2012)	100	100	100	100	100	PDAM, Dinas PUPR
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	6.3.1. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	75 % (2012)	100	100	100	100	100	Dinas PUPR

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 7:								
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1. Rasio elektrifikasi.							
	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita. (Rumah Tangga)	69.40 % (2012) Diolah dari Data RPJMD	100	100	100	100	100	PT PLN Tbk

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua								
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 8:								
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.	0.899 % (2011)	2,5	2,7	2,9	3,4	3,6	Dinas Tenaga Kerja
	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	17.05 % (2012)	20,5	22,5	24,0	25,0	26,0	Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses	8.10.1. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.	3143 (2013)	3148	3150	3150	3150	3150	Dinas UMKM dan BI

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi								
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 9:								

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara								
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 10:								

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN: Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan								
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 11:								

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB: Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan								Menjamin Pola
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 12:								

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM: Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya								Mengambil Tindakan
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 13:								

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumberdadya Kelautan dan Samudra Untuk Pembangunan Berkelanjutan								
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 14:								

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati								
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 15:								

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH:
Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif disemua Tingkatan

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 16:								
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	12 % (2014)	12	30	30	30	30	Badan Kesbangpol dan KPU
	16.7.1. (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II).	10.34 % (2017)	30	30	30	30	30	Baperjakat dan Komisi ASN

MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU

TARGET DAN INDIKATOR

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan								
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	
Target 17:								
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara -Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.	83.538 Pelanggan (2012)	110.000 pelanggan	120.000 pelanggan	122.000 pelanggan	130.000 pelanggan	140.000 pelanggan	Operator Selular
	17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband.*	65.6 % (2012)	75	80	100	100	100	Operator Selular

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ir. TATONG BARA